

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk membahas peran Indonesia sebagai ketua ASEAN (*Association of Southeast Asia Nation*)¹ 2011 dalam upaya perdamaian konflik Thailand-Kamboja, antara lain:

Yang pertama, ASEAN merupakan organisasi internasional yang menjadi pelindung bagi negara anggotanya. Beberapa isu-isu konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara terutama isu-isu yang berkaitan dengan konflik perebutan wilayah teritorial dapat berkembang menjadi isu yang sensitif dan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan apabila tidak dapat ditangani secara serius oleh pihak yang bertikai baik secara bilateral maupun oleh negara-negara di kawasan dalam forum regional ASEAN.

Sebagai organisasi yang berdiri berdasarkan kesepakatan dan kesamaan tujuan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas regional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki peran penting dalam upaya-upaya perdamaian terhadap konflik yang terjadi antara negara-

¹ Istilah Asia Tenggara adalah istilah baru, istilah ini digunakan pada waktu Perang Dunia II dalam rangka ditematkannya Markas Besar tentara sekutu untuk Asia Tenggara di Ceylon. Menurut Som Sakdi Xuto, Asia Tenggara meliputi : Brunei, Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (Utara dan Selatan) (dalam bukunya *Regional Cooperation in Southeast Asia, Problems, Possibilities, and Prospects* (Institute of Asian Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). hlm. 13, diambil dari Sri Setianingsih Suwardi. 2003. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI-Press. hal.226.

negara anggotanya, seperti konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang akan penulis bahas.

Yang kedua, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. Tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 adalah *ASEAN Community in a Global Community of Nation*. Dengan tema ini, Indonesia bertekad untuk memberikan kontribusi konkrit dan bermanfaat dalam pencapaian ASEAN *Community 2015* dengan ASEAN *Security Community* sebagai salah satu pilar penting. Indonesia sebagai negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif juga menjadi salah satu faktor untuk berkontribusi dalam upaya-upaya perdamaian konflik yang terjadi di kawasan ASEAN pada umumnya dan konflik Thailand-Kamboja pada khususnya.

Yang ketiga, pencapaian ASEAN *Community 2015*. Dengan keinginan menciptakan komunitas ASEAN pada tahun 2015, ASEAN dituntut untuk dapat menyatukan negara-negara anggotanya karena konflik yang terjadi di ASEAN antara negara-negara anggotanya tentunya akan mempengaruhi stabilitas regional di ASEAN di bidang ekonomi dan sosial budaya yang menjadi pilar penting dalam pencapaian ASEAN *Community 2015*.

B. Latar Belakang Masalah

Candi Hindu Preah Vihear seluas 4,6 km² yang dibangun pada abad ke-11 sebagai pengabdian kepada Dewa Syiwa terletak di bukit setinggi 525 m di atas permukaan laut di Pegunungan Dângrêk, Provinsi Preah Vihear,

Kamboja dan dekat distrik Kantharalak, Thailand.² Meskipun terletak di wilayah Kamboja, dinding pegunungan Dangrek yang terjal membuat candi di puncak gunung ini hanya dapat ditempuh dari sisi perbatasan dengan Thailand.

Preah Vihear disengketakan pertama kali oleh Thailand pada tahun 1954, yang pada waktu itu mengirimkan pasukan untuk menduduki wilayah candi. Pihak Kamboja yang membawa masalah ini ke Mahkamah *International Court of Justice* (ICJ), yang memenangkan klaim Kamboja. Menanggapi keputusan ICJ, Menlu Thailand pada saat itu Thanat Khoman mengirimkan surat kepada Acting Sekretaris Jenderal PBB untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan ICJ. Namun sebagai anggota PBB pemerintahnya akan menghormati kewajiban pada keputusan tersebut sesuai dengan pasal 94 Piagam PBB.³ Keputusan ICJ tersebut segera diikuti penarikan mundur pasukan Thailand dari wilayah candi. Kemudian pada masa perang saudara Kamboja pada tahun 1975, letak strategis candi Preah Vihear di pegunungan membuatnya sebagai pangkalan pemberontak komunis Khmer Merah. Pendudukan ini tidak ditentang Thailand maupun Kamboja, dan baru berakhir pada tahun 1998. Penyerahan diri komandan milisi terakhir Khmer Merah di Preah Vihear bernilai historis, arena tidak hanya mengakhiri pendudukan kaum komunis terhadap candi, akan tetapi juga mengakhiri tiga dekade perang saudara berdarah di Kamboja.

² Candi Preah Vihear. http://id.wikipedia.org/wiki/Kuil_Preah_Vihear diakses pada Minggu, 4 November 2012.

³ Aris Heru Utomo. 2011. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. Dalam Jurnal Diplomasi vol.3 no.1 Maret 2011, Jakarta: Pusdiklat Kemenlu. hal.44.

Pada tahun 2008, konflik kembali memanas ketika partai royalis *People's Alliance for Democracy* (PAD; disebut juga Kaus Kuning) mulai mempolitisasi Preah Vihear sebagai isu kebanggaan nasional Thailand, terlebih setelah UNESCO menyetujui permohonan Kamboja untuk memasukan candi Preah Vihear sebagai salah satu situs warisan budaya dunia pada bulan Juli 2008. Hal itu segera diikuti oleh pengerahan pasukan dan kontak bersenjata dinantara kedua pihak. Konflik terus berlangsung hingga tahun 2009. Setelah itu, kedua negara setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Agustus 2010, tetapi pada tanggal 4-6 Februari 2011 terjadi baku tembak kembali antara tentara kedua negara. Sejak baku tembak terjadi 22 April 2011, delapan pasukan Thailand dan sembilan pasukan Kamboja tewas. Seorang warga sipil Thailand juga turut tewas dalam kejadian ini. Jadi, jumlah total korban tewas dari pihak Thailand dan Kamboja adalah 18 orang.⁴

Awalnya, Thailand bersikukuh ingin menyelesaikan konflik ini secara bilateral, tanpa campur tangan dari ASEAN. Sedangkan Kamboja ingin menyelesaikan konflik ini melalui PBB. Tetapi, karena desakan dari PBB yang menyerukan agar konflik perbatasan ini diselesaikan melalui ASEAN, akhirnya Thailand dan Kamboja setuju untuk menyelesaikan konflik ini melalui ASEAN. Indonesia selaku ketua ASEAN 2011 memiliki peran penting dalam upaya-upaya perdamaian konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Selain itu, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, kebijakan ini bukan berarti Indonesia menjaga jarak dari masalah-

⁴ Fajar Nugraha. 2011. Thailand-Kamboja Kembali Baku Tembak. <http://international.okezone.com/read/2011/05/03/411/452753/thailand-kamboja-kembali-baku-tembak> diakses pada Minggu, 4 November 2012.

masalah internasional maupun regional dan juga bukan mengabaikan atau melalaikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional.⁵ Kata bebas berarti Indonesia akan memutuskan dan menentukan posisinya dalam masalah-masalah di dunia internasional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sedangkan kata aktif berarti Indonesia berkomitmen untuk berperan dalam upaya-upaya yang konstruktif untuk membangun dan mempertahankan perdamaian dunia.⁶

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 dalam menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja sangat penting mengingat komitmen awal Indonesia yang ingin turut mewujudkan perdamaian dunia seperti yang tercantum ada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, serta kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ladsan tersebut pula yang menguatkan keinginan Indonesia untuk menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja ini.

ASEAN yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang berhasil menjaga perdamaian wilayah melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asean Nations* (TAC) yang ditandatangani pada ASEAN Summit pertama di Bali pada tahun 1976 yang sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional,⁷ ternyata untuk kesekian kalinya diguncang konflik bersenjata antar negara anggota. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja ini tidak hanya mempengaruhi

⁵ Djumadi M.Anwar. *Permasalahan Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: CV.Bebas Aktif. hal. 1

⁶ *Ibid.*

⁷ Bambang Cipto. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.23.

stabilitas politik dalam negeri kedua negara, tapi juga stabilitas regional ASEAN.

Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja ini tentunya sedikit banyak memberikan dampak bagi ASEAN sendiri mengingat keanggotaan kedua negara di ASEAN. Adanya keinginan Kamboja untuk menyelesaikan sengketa ini melalui PBB secara tidak langsung meragukan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal antar negara anggotanya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan pandangan negatif dari negara-negara lain di luar anggota ASEAN, ASEAN dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik internal yang terjadi antar negara-negara anggotanya dan dianggap tidak konsisten dengan aturan-aturan dan perjanjian yang telah disepakati bersama antar negara-negara anggota seperti Piagam ASEAN dan TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*).

Dampak lain yang akan muncul dari adanya sengketa ini adalah terhambatnya pencapaian Komunitas ASEAN di tahun 2015, dimana Komunitas Politik-Keamanan menjadi salah satu pilar utama yang menangani peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan untuk memelihara perdamaian serta memajukan nilai Hak Asasi Manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN.⁸ Komunitas Politik-Keamanan ini juga mempengaruhi kedua pilar utama lainnya yaitu Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya, sebab dengan terjaganya keamanan dan stabilitas politik regional

⁸ Tim Penyusun Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. hal.23.

akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta memperkokoh rasa kesetiakawanan antar negara anggota ASEAN.

Berbeda dengan sikap ASEAN yang selama ini terkesan senyap atau sebatas mengeluarkan pernyataan setiap kali terjadi konflik perbatasan antara negara anggotanya, ASEAN dibawah Kepimpinan Indonesia memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya.⁹ Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers usai mengakhiri rangkaian KTT ke-18 ASEAN di Jakarta. Presiden SBY mengatakan bahwa pengelolaan dan penyelesaian konflik serta arsitektur regional merupakan dua dari sepuluh prioritas selama Keketuaan Indonesia di ASEAN.

Jika berdasarkan urutannya, seharusnya Indonesia baru akan menjabat Ketua ASEAN pada tahun 2013. Namun karena pada tahun tersebut Indonesia akan menjadi tuan rumah APEC, maka beban yang akan diemban oleh Indonesia pada tahun 2013 menjadi cukup berat. Untuk itu, Indonesia melakukan pendekatan kepada Brunei Darussalam, sebab jika Indonesia melakukan pertukaran dengan Kamboja yang akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2012, hal itu tidak memungkinkan, karena Kamboja akan melaksanakan pemilu pada 2013 dan Kamboja merupakan Negara yang terlibat konflik dengan Thailand yang penyelesaiannya menjadi prioritas ASEAN. Sehingga, Brunei Darussalam yang paling memungkinkan.

⁹ Pepih Nugraha. 2011. Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja> diakses pada Minggu, 4 November 2012.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN memiliki sikap mengenai konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, yaitu perlunya mengedepankan penyelesaian perbedaan secara damai. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mendorong pencegahan eskalasi konflik dan melakukan semua upaya guna mencegah kontak senjata antara kedua pihak. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan terus menjembatani penyelesaian perbedaan antara kedua negara dengan mengajukan pikiran dan solusi damai.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana peran Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 dalam upayaperdamaian konflik Thailand-Kamboja?”

D. Kerangka Pemikiran

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.¹¹ Sehingga teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu

¹⁰ Ditjen ASEAN. 2011. ASEAN Miliki Sikap Sama dalam Konflik Thailand-Kamboja. http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=381&lang=en diakses pada Minggu, 4 November 2012.

¹¹ Mohtar Mas'od. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal.186.

kesimpulan.¹² Kerangka dasar teori diperlukan dalam penulisan karya ilmiah sebagai dasar penulisan skripsi ini.

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah penulis rumuskan, penulis menggunakan Teori Resolusi Konflik.

Teori Resolusi Konflik

Konflik dapat dikatakan sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku, bangsa, ras, agama, golongan), karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.¹³ Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal, seringkali konflik itu dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.¹⁴ Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

¹² *Ibid*, hal. 93-94

¹³ Alo Liliweri. 2005. *Prasangka & Konflik*. LKIS: Yogyakarta. Hal. 146

¹⁴ *Ibid*

Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.¹⁵ Jadi, dapat dikatakan resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan upaya penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut baik secara langsung (negosiasi) maupun melalui mediasi.

Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.¹⁶ Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Menurut Peter Wallensteen, definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting, yaitu :¹⁷

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga dapat dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif.

¹⁵ Alo Liliweri. 2005. *Prasangka & Konflik*. LKIS: Yogyakarta. Hal. 289

¹⁶ *Ibid*, hal. 288

¹⁷ Wallensteen Peter (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: Sage, hal.8-9. Dalam Yulius P Hermawan. 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 93.

Dalam hal ini *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) merupakan kesepakatan bersama antara anggota ASEAN dalam menyelesaikan persoalan yang muncul diantara negara anggota ASEAN.

2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak dapat bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.

Hal ini sangat penting karena kedua belah pihak yang berkonflik, dalam hal ini Thailand dan Kamboja harus saling menghargai eksistensi masing-masing karena kedua belah pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.

3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.

Untuk membantu upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, baik Thailand maupun Kamboja harus menahan diri dari berbagai bentuk aksi kekerasan.

Menurut Johan Galtung, ada tiga proses yang harus dilewati sebelum perdamaian dapat dibangun. Ketiga proses tersebut adalah :¹⁸

¹⁸ Johan Galtung (1975). "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding". Dalam Johan Galtung (ed.). *Peace, War, and Defence-Essay in Peace Research* Copenhagen: Christian Ejlertsen, dikutip dalam High Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. London. Polity Press, hal.66. Dalam

1. Peacemaking

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Cara-cara diplomatik lebih ditonjolkan dalam penghentian konflik dan pencapaian penyelesaian damai.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

2. Peacekeeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

Menurut definisi ini, untuk konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja dapat dikesampingkan karena upaya perdamaian yang dilakukan berlangsung tanpa intervensi militer manapun. Hal ini sesuai

Yulius P Hermawan. 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 93.

dengan ASEAN Way,¹⁹ yaitu kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan dengan lebih mengedepankan upaya diplomasi, tekanan, dan pencegahan sedemikian rupa sehingga tanpa melibatkan aksi militer.

3. Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan *negative peace* berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Proses tersebut dalam konflik Thailand-Kamboja masih memerlukan waktu. Meskipun upaya-upaya diplomasi dalam rangka perdamaian antara Thailand dan Kamboja memperlihatkan perkembangan yang baik.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara bahwasannya peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Thailand Kamboja yakni Indonesia sebagai ketua ASEAN melakukan upaya *peacemaking* dan *peacebuilding* dalam penyelesaian konflik Thailand Kamboja dimana

¹⁹ Bambang Cipto. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.26.

Indonesia berupaya menemukan kedua pihak yang berkonflik dimeja perundingan dan mengedepankan cara-cara diplomatik agar mendapatkan jalan penyelesaian untuk konflik, serta mengirimkan tim observer di wilayah perbatasan kedua negara untuk menjaga agar tidak terjadi bentakan senjata selama upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini merupakan upaya pencarian data dengan menelusuri buku, berita, maupun artikel. Data yang penulis peroleh merupakan data sekunder, atau data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Karena itu penulisan karya tulis ini bersifat literer, maksudnya studi pustaka, karena diteliti dari bahan-bahan tertulis.²¹

²⁰ Moh.Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal.63.

²¹ Tatang M.Anwari. 1996. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. hal.135.

2. Metode Pengolahan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu: menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data.²² Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul “PERAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN 2011 DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK THAILAND-KAMBOJA” bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 dalam upaya perdamaian konflik Thailand-Kamboja.

H. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai upaya perdamaian konflik Thailand-Kamboja maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah tahun 2011 selama Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN.

²² Masri Singarumbun & Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. hal.21

I. Sistematika Penulisan

Sebuah karya penelitian dapat dikatakan ilmiah atau tidak salah satunya dilihat dari sistematika penulisan. Dengan demikian penulisan yang sistematis menjadi salah satu syarat mutlak untuk kaidah penelitian yang ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka teoritik, hipotesa, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II, akan membahas mengenai ASEAN dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011.

BAB III, akan membahas mengenai sejarah dan dinamika konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.

BAB IV, akan membahas mengenai upaya-upaya perdamaian yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 terhadap konflik Thailand-Kamboja.

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas, serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup skripsi.